



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA
KOTA PALOPO TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT A.N. AKHMAD
SYARIFUDDIN**

J A K A R T A

JUMAT, 4 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta

TERMOHON

KPU Kota Palopo

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait a.n. Akhmad Syarifuddin

**Jumat, 4 Juli 2025, Pukul 13.58 – 14.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Wahyudi Kasrul
2. Rachmat Setyawan
3. Ardianto

B. Pemberi Keterangan dari Termohon:

Ahmad Adiwijaya

C. Kuasa Hukum Termohon:

Khairil Amin

D. Pihak Terkait:

Akhmad Syariffuddin

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Julianto Asis
2. Muh. Imam Taufiq Rusdin

F. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Totok Hariyono | (Bawaslu RI) |
| 2. Adnan Jamal | (Bawaslu Prov. Sulsel) |
| 3. Ardiansah Indra Panca Putra | (Bawaslu Kota Palopo) |
| 4. Widiyanto Hendra | (Bawaslu Kota Palopo) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.58 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Kita mulai.

Sidang untuk Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, Pemohon siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [00:54]

Bismillahirrahmaanirrahim. Izin, Yang Mulia, Kalinta Law Firm, mewakili Pemohon yang hadir hari ini, Wahyudi Kasrul, Rachmat Setyawan, dan Ardianto. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Termohon, silakan!

4. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [01:06]

Izin, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. Kami dari Termohon hadir pada hari ini dari MAP and co, saya sendiri, Khairil Amin, dan rekan saya sebagai Prinsipal Kadvis Divisi Teknis, Pak Adiwidjaya.
Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Pihak Terkait, silakan!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [01:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir kami Kuasa Hukum Pihak Terkait berdua, atas nama Julianto Asis dan Muhammad Imam Taufiq R, beserta Pihak Prinsipal, Calon Wakil Wali Kota Bapak Akhmad Syarifuddin.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:42]

Terima kasih.
Dan Bawaslu, silakan!

8. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [01:47]

Izin, Yang Mulia, Totok Hariyono, Bawaslu RI, mendampingi Bawaslu Provinsi, Pak Adnan, Bawaslu Palopo, Pak Widiyanto, Bawaslu Palopo, Pak Ardiansah.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengar konfirmasi dari Pak Akhmad Syarifuddin, calon Wali kota ... Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 4, ya. Tapi sebelum itu kami mau ke Bawaslu dulu. Bawaslu Palopo ada? Kapan Anda ... apa ... apa namanya ... itu soal tindak lanjut berkenaan dengan statusnya Pak Akhmad Syarifuddin, itu kapan Anda ketahui? Kan ada laporan kan?

10. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [02:55]

Kami ketahui ketika ada laporan yang masuk tanggal 24 Maret Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

24 Maret 2025, ya?

12. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:04]

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Ini setelah ada penetapan pasangan calon baru atau belum?

14. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:08]

Setelah penetapan pasangan calon yang baru.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Setelah ada penetapan, ya?

16. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:14]

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Itu yang melapor siapa, Pak?

18. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:18]

Bapak Reski Adi Putra.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:20]

Reski Adi Putra. Setelah Bapak laporkan, kemudian ditelaah ternyata memang ada peristiwa pidana itu?

20. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:32]

Pelanggaran administrasi, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Ya, pelanggaran administrasi calon, ya?

22. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:38]

Ya, benar, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Bisa diceritakan enggak, detailnya?

24. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [03:41]

Jadi, setelah ada laporan yang masuk, Yang Mulia, kami lakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9. Kemudian, kami lakukan kajian dan kami menyatakan bahwa memang ada pelanggaran administrasi dan kami rekomendasikan kepada KPU.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Apa bentuknya? Pelanggaran administrasi itu apa jenisnya? Spesifiknya apa? Kan, administrasi itu banyak.

26. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [04:05]

Ya, pelanggaran administrasi berupa ketidakterpenuhan syarat calon, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:12]

Oke. Karena?

28. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [04:15]

Karena yang bersangkutan tidak mengumumkan statusnya sebagai terpidana.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:22]

Mengumumkan status sebagai terpidana. Oke, itu tanggal 24 ya, rekomendasinya ke KPU?

30. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [04:30]

Tanggal 2 April rekomendasinya, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Oh, rekomendasinya 2 April.

32. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [04:35]

Ya. Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:37]

2 April 2025. PSU-nya ini tanggal berapa?

34. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [04:42]

Tanggal 24 Mei.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:43]

24 Mei 2025. Oke. Kemudian direkomendasikan ke Bawaslu. Bapak tahu apa perkembangannya? Direkomendasikan ke KPU, apa perkembangannya di KPU?

36. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [05:00]

Setelah kami rekomendasikan, tanggal 8 April, KPU Kota Palopo dalam hal ini oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan membalas dengan Surat Nomor 14 ... 1499/PL.02.02 dan seterusnya, dimana Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E. diwajibkan untuk memenuhi syarat, pemenuhan syarat, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Syarat untuk mengumumkan, ya?

38. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [05:39]

Mengumumkan, mengumumkan.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:40]

Oke. Nah, itu kalau soal Ketua Pengadilan Negeri Palopo mengklarifikasi status itu, Anda tahu?

40. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [05:50]

Itu ada surat tembusan yang masuk ke Bawaslu, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Ada tembusan, ya?

42. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [05:56]

Ada tembusan surat.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Tapi rekomendasi Saudara ke KPU, KPU Sulawesi Selatan itu ditembuskan ke pengadilan, enggak?

44. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [06:03]

Tidak, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Tidak, ya. Oke. Berhenti kita dulu di situ, saya mau ke KPU.
Bagaimana caranya pengadilan negeri tahu tentang status itu, sehingga kemudian lahir Surat Ketua Pengadilan Negeri tentang klarifikasi status kandidat itu?

46. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [06:25]

Izin, Yang Mulia. Terkait bagaimana pengadilan ketahu, kami juga kurang tahu.

47. KETUA: SALDI ISRA [06:30]

Tidak tahu juga?

48. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [06:31]

Ya, bagaimana pengadilan tahu.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:32]

Tapi kemudian sudah menerima surat dari pengadilan, lalu penarikan status sebagai tidak pernah terpidana itu?

50. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [06:40]

Ya, dalam (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [06:40]

Tanggal berapa Anda terima suratnya?

52. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [06:42]

Dalam bentuk tembusan, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Tembusan itu kalau begitu ke mana dialamatkan suratnya?

54. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [06:47]

Ke KPU.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:48]

KPU RI?

56. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [06:49]

KPU Palopo.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:50]

Oke. Kan pelaksanaannya kan KPU Sulawesi Selatan, kan?

58. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [06:53]

Ya, siap.

59. KETUA: SALDI ISRA [06:54]

Oke. Itu tanggal berapa? Masih ingat, enggak?

60. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [06:58]

Tertanggal yang tertera di ini tanggal 8 April.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

8 April. Oke. Nanti kita lanjutkan.

Pak Syarifuddin. Terima kasih, Pak, ini sudah mengganggu Bapak ini. Tapi ini supaya kita bisa agak klir ya melihat kasus ini. Bapak itu kan pernah mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Palopo sebagai tidak pernah terpidana, ya?

62. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [07:29]

Siap, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [07:30]

Itu di periode yang sebelumnya, kan?

64. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [07:32]

Periode sebelumnya.

65. KETUA: SALDI ISRA [07:32]

Sebelum pemungutan suara ulang, kan?

66. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [07:35]

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Kapan itu dibatalkan oleh pengadilan negeri, Pak? Bapak masih ingat, enggak?

68. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [07:42]

Tanggalnya saya kurang ingat. Pada saat sebelum ada gonjang-ganjing isu itu, kemudian maka pengadilan membatalkan itu, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [07:51]

Membatalkan itu setelah Bapak dicalonkan untuk yang kedua, ya?

70. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [07:55]

Siap.

71. KETUA: SALDI ISRA [07:55]

Dengan calon yang baru, Ibu apa namanya?

72. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [07:57]

Ibu Naili.

73. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Ibu Naili. oke, berapa hari setelah Bapak ditetapkan sebagai calon itu sudah Bapak menerima surat itu, Pak?

74. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [08:07]

Kurang lebih, ya, kurang lebih seminggu barangkali, Yang Mulia. Karena (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [08:15]

Kurang lebih satu minggu, ya?

76. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [08:16]

Ya, tanggal pastinya.

77. KETUA: SALDI ISRA [08:17]

Itu sebelum ada kampanye, ya?

Ada kampanye juga enggak KPU, kemarin? Enggak, ya? Kan dikasih kesempatan untuk kampanye.

78. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [08:24]

Ya, izin, Yang Mulia, tetap ada kampanye selama 14 hari.

79. KETUA: SALDI ISRA [08:27]

Selama 14 hari, ya.

80. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [08:28]

Siap.

81. KETUA: SALDI ISRA [08:29]

Jadi, itu diketahui setelah kampanye atau sebelum kampanye?

82. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [08:32]

Sebelum kampanye, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [08:33]

Sebelum kampanye.

Itu kampanye tanggal berapa sampai berapa?

84. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [08:36]

Kampanye itu 14 hari sebelum hari masa tenang.

85. KETUA: SALDI ISRA [08:40]

Ya, berarti bisa enggak, Bapak ingat-ingat?

86. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [08:42]

Berarti 24, sekitar tanggal 7, Yang Mulia, masa kampanye dimulai.

87. KETUA: SALDI ISRA [08:47]

7 sampai 21, gitu?

88. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [08:52]

Siap, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [08:54]

Ya, 22, 23, 24, minggu tenang. Pemungutan suara tanggal 25?

90. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [09:01]

24.

91. KETUA: SALDI ISRA [09:02]

24. Berarti 7 sampai 20 kalau begitu, ya?

92. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [09:06]

Siap, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [09:07]

Oke, menjelang ini.

Oke, Pak ... Pak Syarifuddin, setelah Bapak dilaporkan dan ... apa ... ke Bawaslu, Bawaslu kemudian merekomendasikan ke ... apa ... ke KPU, dalam hal ini KPU Sulawesi Selatan, lalu tiba-tiba Bapak disuruh memenuhi persyaratan?

94. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [09:27]

Siap, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [09:28]

Bapak menerima apa dari KPU?

96. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [09:31]

Surat untuk pemenuhan persyaratan.

97. KETUA: SALDI ISRA [09:33]

Ya.

98. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [09:34]

Itu ada empat, Yang Mulia. Yang pertama (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [09:37]

Untuk memenuhi empat syarat, apa?

100. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [09:39]

Siap. Diumumkan secara terbuka, baik di media massa, media sosial (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [09:45]

Diumumkan secara terbuka?

102. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [09:46]

Dan di tempat ruang terbuka.

103. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Ya.

104. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [09:48]

Kemudian, surat keterangan tidak pernah pidana berulang.

105. KETUA: SALDI ISRA [09:52]

Oh, surat keterangan pidana tidak pernah berulang, ya?

106. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [09:55]

Ya. Kemudian dari ... surat keterangan dari lapas.

107. KETUA: SALDI ISRA [09:59]

Oke.

108. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [10:00]

Dan salinan putusan pengadilan yang disahkan.

109. KETUA: SALDI ISRA [10:04]

Salinan.

Oke, Bapak menerima salinan putusan pengadilan itu kapan, Pak? Bapak masih ingat, enggak?

110. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [10:12]

Tanggal pastinya saya enggak ingat, Yang Mulia. Tapi setelah ada ini, kami juga melakukan cross-check ke pengadilan dan meminta salinan putusan itu sendiri.

111. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Bapak ini kan tahun 2018 terpidananya, ya?

112. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [10:22]

Baik, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [10:23]

2018?

114. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [10:24]

2018.

115. KETUA: SALDI ISRA [10:25]

Itu kapan Bapak menerima salinannya?

116. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [10:28]

Salinannya di 2018 juga kami sudah terima, Yang Mulia. Namun, ketika untuk PSU ini kami coba meminta (...)

117. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Minta lagi, ya? 2018 Bapak sudah terima, ya? Oke, ini klir. Jadi, 2018 itu sudah terima, tapi entah di mana naskahnya, segala macam. Lalu, untuk memenuhi syarat itu diminta lagi ke pengadilan. Dikasih pengadilan, Pak, ya, salinannya?

118. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [10:50]

Siap, Yang Mulia.

119. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [10:51]

Dan itu yang dibawa untuk persyaratan ke KPU?

120. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [10:55]

Nanti setelah (...)

121. KETUA: SALDI ISRA [10:56]

Ya, untuk melengkapi syarat itu, kan?

122. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [10:57]

Melengkapi persyaratan itu, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [10:58]

Melengkapi persyaratan itu, oke. Dan itu Bapak sudah cukupkan empat itu, ya?

124. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [11:03]

Cukupkan empat, sesuai yang dipersyaratkan.

125. KETUA: SALDI ISRA [11:05]

Sesuai yang dipersyaratkan. Bapak sudah mengumumkan juga?

126. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [11:08]

Sudah, Yang Mulia. Bahkan sebelum pendaftaran di PSU sendiri itu, kami secara sadar dan meyakini kami mengumumkan di bahkan di media sosial saya pribadi, di media *Palopo Pos* pada tanggal 7 Maret saya juga mengumumkan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kami dan komitmen kejujuran kami bahwa tidak ada yang kami tutup-tutupi.

127. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Oke, klir sampai di situ. Nah, pertanyaan, Pak, sekarang. Saya mau Bapak ke depan dulu, Pak, sebentar, Pak. Pak Syarifuddin. Kalau ada yang mau kuasa hukumnya menemani, silakan! Dari KPU juga Bapak, Termohon, Pihak Terkait!

Bapak pernah mengajukan permohonan enggak, ke pengadilan negeri pada tanggal 19 Agustus 2024?

128. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [11:58]

Pernah, Yang Mulia. Jadi (...)

129. KETUA: SALDI ISRA [13:39]

Ya, satu-satu dulu! Pak Syarifuddin, santai! Pernah, ya?

130. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [12:00]

Jadi, mohon izin, Yang Mulia. Siap. Biar saya jelaskan (...)

131. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Bapak mengajukan, ya?

132. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [12:05]

Siap.

133. KETUA: SALDI ISRA [12:07]

Ini Bapak tanda tangani?

134. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [12:07]

Karena (...)

135. KETUA: SALDI ISRA [12:07]

Enggak. Bapak jawab dulu! Bapak tanda tangani?

136. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [12:35]

Oh, siap, Yang Mulia. Itu sebagai prasyarat sebelum terbitnya.

137. KETUA: SALDI ISRA [12:36]

Bukan. Sabar! Sekarang pertanyaan saya ... Bapak lihat ke sini, Pak! Nanti Bapak jangan asal mengiyakan. Nah. Enggak apa-apa, Pak. Naik saja, Pak, biar, biar tinggi juga, kelihatan. Ini tanda tangan Bapak, ya? Bapak mengirim surat untuk minta ini ke pengadilan negeri tanggal 19 Agustus, ya?

138. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [12:40]

Ya.

139. KETUA: SALDI ISRA [12:40]

Oke. Ini Bapak juga yang tanda tangan, Pak, surat pernyataan ini?

140. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [12:41]

Ya.

141. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Ini tanda tangan Bapak, ya?

142. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [12:44]

Siap, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [12:44]

Ini tanggal 20 Agustus, ya?

144. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [12:49]

Ya.

145. KETUA: SALDI ISRA [12:49]

Oke, Bapak kembali ke tempat duduk, Pak!

Pak Syarifuddin, terima kasih sudah mengonfirmasi Bukti P-13 dan P-14 ini. Tapi pertanyaan kami selanjutnya adalah mengapa ketika di proses awal yang dulu Bapak wakil dengan pak ... apa ... pak ... apa namanya ... Pak Trisal itu dulu, Bapak tidak ... pertanyaannya belum begitu. Ketika Bapak mengisi ... apa namanya ... yang di KPU itu istilahnya untuk pendaftaran itu apa namanya, Pak? Silon? Silon, ya. Di Silon itu Bapak dulu mengisi sebagai ... apa ... pernah terpidana atau tidak?

146. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [13:43]

Mohon izin, Yang Mulia, sesuai informasi dari KPU melalui divisi teknis kepada LO kami bahwa kami wajib memenuhi syarat itu karena dalam pemberitahuan itu adalah kami tidak termasuk dalam kategori itu karena ancamannya di bawah 5 tahun. Sementara kami ini kan ancamannya 18 bulan, sehingga tafsiran kita, kita tidak masuk dalam itu, dan itu juga sesuai petunjuk, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [14:15]

Sehingga Bapak di Silon itu membuat tidak pernah terpidana?

148. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [14:19]

Siap, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [14:19]

Oke, satu. Bapak kan pernah terpidana, tapi kenapa di surat-surat Bapak ini kemudian Bapak mengatakan tidak pernah terpidana?

150. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [14:19]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Ya.

152. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [14:21]

Sekali lagi bahwa sesuai dengan syarat yang dipersyaratkan kepada kami, melalui LO, kami harus melengkapi syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah surat keterangan tidak pernah terpidana dari pengadilan. Nah, ketika proses pengurusan surat keterangan itu, maka kami dahului dengan pengisian SKCK dan di situ kami cantumkan bahwa kami pernah terpidana. Itu juga kemudian dalam proses (...)

153. KETUA: SALDI ISRA [14:58]

Di SKCK yang dikeluarkan kepolisian?

154. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [15:00]

Kepolisian. Siap, Yang Mulia. Itu kita cantumkan bahwa kita pernah (...)

155. KETUA: SALDI ISRA [15:00]

Kami.

156. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [15:01]

Kami pernah terpidana pemilu pada saat 2018 dan itu diketahui oleh teman-teman Bawaslu. Karena pada saat itu prosesnya ada di Bawaslu, Yang Mulia, prosesnya ada di Gakkumdu.

157. KETUA: SALDI ISRA [15:16]

Oke. Sebentar, sebentar! Kita lihat SKCK-nya, ya. Ini SKCK Bapak di kepolisian, Bapak disebut itu Pasal 187 ayat (2). Kita cek, tolong undang-undang ... apa (...)

158. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [15:37]

Juncto Pasal 69.

159. KETUA: SALDI ISRA [15:40]

Undang-Undang Pilkada ada enggak, yang kemarin? Pasal 167 ... 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c. Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

187 ayat (2) itu, "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye."

Lalu, kemudian merujuknya Pasal 69, coba 69, Mas! 69 huruf c, 69 huruf c melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba, partai politik perseorangan, kelompok masyarakat. Nah, di sini ini memang kecil-kecil sekali ini, Pak, setelah diadakan penelitian hingga saat ini, dikeluarkan surat keterangan yang didasarkan kepada catatan kepolisian yang ada satu, itu disebutkan selama ia berada di Indonesia dari 11 Januari 1979 sampai 16 Agustus 2024. Ini ya, Pak, ya? Tapi di sini kan tidak ada terpidana atau tidaknya kan, Pak, ya?

160. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [18:04]

Secara detail dari pasal itu memang menjelaskan.

161. KETUA: SALDI ISRA [18:07]

Bukan, ini kan pasalnya saja disebutkan.

162. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [18:09]

Ya, pasalnya karena itu produk dari Kepolisian.

163. KETUA: SALDI ISRA [18:12]

Coba KPU Anda jelaskan, bagaimana Anda bisa ... ini Anda mengatakan tidak perlu memenuhi itu dari KPU, ya?

164. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [18:18]

Siap, Yang Mulia.

Jadi, sesuai hasil konsultasi kami dengan LO bahwa ... dan itu sejalan dengan apa yang ada di pikiran kami bahwa yang dimaksud di situ adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sementara kami ini ancumannya 18 bulan, Yang Mulia, kecuali terhadap pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa.

165. KETUA: SALDI ISRA [18:56]

Oke, itu ... itu ... itu soal tafsir itu nanti kami yang menyelesaikan. Pertanyaan saya kepada Bapak Syarifuddin, Bapak, adalah ... Syarifuddin, siapa yang menyampaikan kepada Bapak bahwa Bapak tidak perlu mengisi keterangan tidak pernah terpidana itu?

166. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [19:15]

Sesuai hasil konsultasi LO kami, Saudara Hamzah menyampaikan kepada kami hasil konsultasi dengan (...)

167. KETUA: SALDI ISRA [19:21]

Konsultasinya ke mana?

168. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [19:22]

Ke KPU, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [19:23]

Oke, berhenti di situ dulu, Pak.
KPU pernah, enggak? Nah, ini jadi masalah ini karena KPU-nya itu KPU yang lama.

170. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [19:29]

KPU yang lama.

171. KETUA: SALDI ISRA [19:31]

Ada enggak itu, hasil konsultasi itu di catatan Anda?

172. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [19:34]

Izin, Yang Mulia. Di pencalonan awal tidak pernah ada konsultasi ke kami di KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait hal tersebut.

173. KETUA: SALDI ISRA [19:43]

Kalau KPU Polopo?

174. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [19:45]

Ya, tidak ada waktu itu.

175. KETUA: SALDI ISRA [19:46]

Tidak ada catatan?

176. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [19:47]

Tidak ada.

177. KETUA: SALDI ISRA [19:48]

Tidak ada catatan dan tidak ada pernyataan bahwa ini bukan tindak pidana, bukan melakukan tindak pidana, ya?

178. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [19:54]

Tidak dikonsultasikan ke kami, izin, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [19:57]

Kaminya ini KPU Palopo, ya?

180. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [20:00]

Waktu di pencalonan awal, KPU Palopo tidak konsultasikan ke kami selaku KPU Sulsel waktu itu.

181. KETUA: SALDI ISRA [20:05]

Oke.

Kalau begitu, saya ke Bawaslu. Bawaslu, ketika pencalonan awal itu ada enggak, soal ini didiskusikan? Ini ada SKCK yang menyebutkan Pasal 187 itu dengan Pasal 69 huruf c tadi itu, ada enggak, itu didiskusikan itu pidana atau tidaknya? Bawaslu?

182. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [20:30]

Tidak pernah, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [20:31]

Ada enggak, Pak Syarifuddin ini kemudian LO-nya menyampaikan, menanyakan itu?

184. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [20:37]

Kepada Bawaslu tidak pernah, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [20:38]

Kepada Bawaslu tidak pernah.
Pak Syarifuddin, Bapak dapat cerita bahwa ini dari LO KPU atau Bawaslu itu dari siapa?

186. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [20:46]

Dari LO kami, Yang Mulia. Jadi, mohon izin saya lanjutkan, Yang Mulia. Jadi ketika kami mendapatkan info, maka kami melakukan pengurusan di ... di pengadilan negeri (...)

187. KETUA: SALDI ISRA [20:56]

Ya.

188. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [20:56]

Yang diadu oleh SKCK itu tadi. Nah, kemudian ketika keluar surat keterangan itu, kami menyerahkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada KPU, dan ternyata setelah hasil penerimaan berkas itu, tidak pernah juga ada penyampaian kepada kami, baik melalui KPU ataupun melalui Bawaslu bahwa ada yang keliru dalam itu, sehingga kami merasa bahwa tidak ada persoalan, Yang Mulia. Ada masa sanggah yang seharusnya bisa disampaikan kepada kita (...)

189. KETUA: SALDI ISRA [21:20]

Oke, cukup. Nanti, Pak, jangan ... kita sedikit-sedikit.

190. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [21:24]

Siap, Yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA [21:24]

Nah, karena begini kami kan tadi mengonfirmasi kepada Bapak, Bapak pernah menulis dua surat ... dua surat dan satu itu surat ke ... apa ... ke pengadilan negeri, ke ketua pengadilan negeri yang dalam surat itu, Bapak menyatakan tidak pernah terpidana kan?

192. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [21:44]

Siap, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [21:44]

Tapi, Bapak pernah dihukum, ya, karena melakukan pidana pemilu, ya?

194. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [21:48]

Siap.

195. KETUA: SALDI ISRA [21:48]

Yang menurut pemahaman Bapak itu tidak terkategori yang menghalangi, ya?

196. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [21:54]

Ya, siap.

197. KETUA: SALDI ISRA [21:54]

Oke. Karena Bapak menganggap diancamp pidana lima tahun atau lebih, gitu ya?

198. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [21:59]

Siap.

199. KETUA: SALDI ISRA [21:59]

Oke. Nanti pasal itu kami selesaikan, Pak, orang kami yang bikin pemaknaan pasal itu. Tapi kenapa kemudian Bapak berubah, bahkan katanya dengan kesadaran sendiri, tadi mengatakan mengumumkan bahwa pernah terpidana itu, apa yang mengubah pendirian Bapak?

200. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [22:17]

Mohon izin, Yang Mulia. Karena setelah adanya isu-isu dan selebaran yang beredar yang mengatakan bahwa ada kesan ketidakkejujuran kepada kami, maka kami berinisiatif dengan penuh kesadaran diri untuk mengumumkan itu secara terbuka walaupun dari awal kami merasa bahwa itu tafsiran kita tidak masuk dalam ... karena tidak pernah ada penyampaian kepada kami bahwa itu tidak ... apa ... tidak sesuai yang dipersyaratkan, bahkan pada saat penyerahan berkas pun, penelusuran administrasi sampai kepada proses perbaikan tidak pernah ada penyampaian satu surat pun kepada kami, baik melalui LO ataupun kepada saya langsung, untuk melakukan perbaikan itu. Tetapi dengan kesadaran diri kami mengumumkan itu demi menghindari ada kesan bahwa ada hal yang ditutup-tutupi. Kami mengumumkan secara terbuka di *Palopo Pos* sebelum pendaftaran di PSU pada tanggal 7 Maret 2025, kemudian diumumkan di media sosial saya secara pribadi di dalam hal ini di Instagram, Yang Mulia. Kemudian, kami di ruang publik kami juga pasang spanduk. Ini sebagai bentuk tanggung jawab (...)

201. KETUA: SALDI ISRA [23:21]

Oke.

202. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [23:21]

Kemudian, pada saat pendaftaran di PSU setelah ada rekomendasi Bawaslu, kami kembali lagi mengumumkan di media melalui media *Palopo Pos* pada tanggal 9 April, gitu.

203. KETUA: SALDI ISRA [23:30]

Oke. Jadi, setelah orang ribut baru Bapak sadar, ya? Kan ya, begitu, kan?

204. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [23:34]

Siap, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [23:34]

Sadar, orang ribut tiba-tiba belum ada apa-apa sudah diumumkan, ya?

206. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [23:40]

Ya, kami dengan sadar mengumumkan itu sebagai bentuk tanggung jawab dan kejujuran.

207. KETUA: SALDI ISRA [23:44]

Kalau dulu ketika di yang pertama itu belum sadar, ya?

208. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [23:48]

Sebenarnya, sekali lagi mohon maaf, Yang Mulia. Karena kami merasa bahwa itu tidak masuk dalam kategori itu, karena biar bagaimanapun hampir seluruh masyarakat Palopo tahu karena proses 2018 itu kan prosesnya di Pilkada, Yang Mulia. Bahkan, proses itu diawali di ... kalau tidak ... di Bawaslu. Pasti Bawaslu juga tahu. Jadi, agak keliru kalau baru taunya setelah ada surat yang masuk. Karena 2018 ini prosesnya di Bawaslu, melalui Gakkumdu.

209. KETUA: SALDI ISRA [24:12]

Oke. Oke, Bapak berhenti dulu, saya mau ke Bawaslu.
Bawaslu, ndak pernah ada Anda diskusikan yang kayak begini, ketika ... apa namanya ... yang proses pertama dulu?

210. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [24:20]

Tidak ada, Yang Mulia. Karena sekali lagi, ada surat yang ... ada ... apa ... syarat yang dimasukkan oleh Paslon Nomor 4 yang jelas menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terpidana.

211. KETUA: SALDI ISRA [24:39]

Oke.

212. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [24:39]

Sekaitan dengan tahun 2018 itu kabupaten/kota itu masih ad hoc waktu itu.

213. KETUA: SALDI ISRA [24:44]

Oke.

214. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [24:44]

Masih panwaslu waktu itu juga ... ya, gitu.

215. KETUA: SALDI ISRA [24:48]

Oke, saya kembali ke Pak Syarifuddin. Kan tiba-tiba kemudian KPU mengklarifikasi, ya, Pak ... pengadilan negeri mengklarifikasi, ya, kemudian menarik suratnya, itu Bapak pernah datang enggak, setelah itu ke pengadilan?

216. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [25:01]

Sebelumnya itu melalui LO kami, kami berkomunikasi lewat pengadilan.

217. KETUA: SALDI ISRA [25:07]

Lewat pengadilan.

218. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [25:08]

Nah, dari (...)

219. KETUA: SALDI ISRA [25:09]

Bapak ... Bapak ... jangan dulu, satu-satu dulu! Bapak berkomunikasi, ya?

220. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [25:13]

Ya, melalui ... melalui LO (...)

221. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Ketika mau proses pencalonan yang kedua, ya?

222. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [25:16]

Siap, Yang Mulia.

223. KETUA: SALDI ISRA [25:16]

Lalu, karena itu diketahui, ada enggak, Bapak berkirim surat resmi?

224. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [25:23]

Kami sempat berkeberatan juga, Yang Mulia, kenapa surat yang itu, bahkan kami minta surat keterangan terpidana, tapi karena dalam tafsiran kita bahwa ... termasuk pengadilan karena tidak mengeluarkan surat itu, kami minta surat terpidana.

225. KETUA: SALDI ISRA [25:38]

Bukan. Itu kan dulu Bapak kan masukin surat, Bapak mengatakan tidak terpidana. Ya, kan?

226. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [25:42]

Ya, siap.

227. KETUA: SALDI ISRA [23:43]

Ya, kan?

228. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [25:44]

Ya.

229. KETUA: SALDI ISRA [25:44]

Lalu dikeluarkan oleh pengadilan. Jalan terus, ya, kan?

230. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [25:47]

Ya.

231. KETUA: SALDI ISRA [25:47]

Lalu kemudian ada PSU, muncul ini, ya, kan? Lalu Bapak datang berinisiatif dengan LO ke situ, ke pengadilan negeri?

232. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [25:57]

Mohon izin, Yang Mulia. Maksud saya, sebelum PSU itu sendiri, kami juga sudah mempertanyakan itu (...)

233. KETUA: SALDI ISRA [26:02]

Ya, betul.

234. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [26:02]

Karena di SKCK kan ada jelas dicantum bahwa kita pernah terpidana. Nah, karena pengadilan juga menerbitkan itu karena hasil penelusuran di SIPP pengadilan tidak menemukan nama kami, Yang Mulia, karena prosesnya itu ada 4 tahap (...)

235. KETUA: SALDI ISRA [26:15]

Tapi kan Bapak tahu, Pak ... Pak Syarifuddin, Bapak kan pernah tahu bahwa Bapak dipidana, kan? Tapi, karena Bapak memahami itu tidak termasuk kategori yang 5 tahun (...)

236. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [26:24]

Justru (...)

237. KETUA: SALDI ISRA [26:24]

Pelan dulu, Pak! Tapi karena Bapak memaknai secara pribadi bahwa hukuman yang dijatuhkan itu kecil, sehingga tidak masuk 5 tahun, maka itu dianggap bukan pernah dipidana, ya?

238. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [26:37]

Ya, betul, Yang Mulia. Namun, kami juga tetap menyampaikan keberatan itu, Yang Mulia. Bahwa menyampaikan (...)

239. KETUA: SALDI ISRA [26:42]

Keberatan itu kapan Bapak sampaikan?

240. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [26:44]

Pada saat pendaftaran, sebelum mengurus SKCK awal itu.

241. KETUA: SALDI ISRA [26:47]

PSU?

242. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [26:48]

Sebelum PSU. Yang pertama, Yang Mulia. Kami sudah mempertanyakan karena jelas di SKCK ada surat keterangan itu.

243. KETUA: SALDI ISRA [26:55]

Ya. Tapi, kalau itu, Pak ... ini saya ikuti logika Bapak, Bapak mengatakan di SKCK-nya jelas.

244. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [27:01]

Siap.

245. KETUA: SALDI ISRA [27:01]

Mengapa surat Bapak ini, Bapak sampaikan ke pengadilan bahwa Bapak tidak pernah terpidana?

246. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [27:06]

Karena, mohon izin, Yang Mulia. Kan di sistem pengadilan itu ada SIPP itu ada penelusuran.

247. KETUA: SALDI ISRA [27:10]

Ya.

248. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [27:10]

Nah, hasil penelusuran di situ tidak ditemukan (...)

249. KETUA: SALDI ISRA [27:13]

Bukan. Ini Bapak yang saya tanya dulu.

250. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [27:15]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Nah, di ... karena di (...)

251. KETUA: SALDI ISRA [27:17]

Pelan, Pak! Bapak Syarifuddin, Bapak pelan-pelan! Tenang, Pak! Kan Bapak sudah pernah dipidana, pidana pemilu, ya?

252. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [27:24]

Ya, siap.

253. KETUA: SALDI ISRA [27:25]

Dihukum berapa bulan pun, lah terserahlah, mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 4 bulan, itu cerita lain. Bapak tahu kan bahwa Bapak pernah dipidana?

254. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [27:33]

Siap, Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [27:34]

Nah. Kenapa surat Bapak ini masuk ke pengadilan mengatakan bahwa tidak pernah terpidana?

256. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [27:39]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin.

257. KETUA: SALDI ISRA [27:40]

Ya.

258. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [27:40]

Surat itu adalah format dari pengadilan. Karena tadi saya jelaskan karena sistemnya SIPP, ada penelusuran. Nah, ketika sebelum terbit surat keterangan dari tidak pernah ... tidak pernah terpidana dari pengadilan, maka pengadilan menyodorkan kepada kami untuk mengisi format itu terlebih dahulu.

259. KETUA: SALDI ISRA [27:57]

Oke. Kalau surat ini format apa, Pak? Ini yang pengadilan, oke.

260. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:02]

Ya, siap.

261. KETUA: SALDI ISRA [28:03]

Bapak menemukan ... ini format yang (...)

262. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:04]

Ya, karena kan sebelum format itu kita mendahului surat pernyataan itu, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [28:07]

Nah, Bapak mendahului surat, ya, sebelum melihat format, ya?

264. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:08]

Ya, karena berdasarkan Permohonan permintaan dari pengadilan.

265. KETUA: SALDI ISRA [28:13]

Ya.

266. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:14]

Ya.

267. KETUA: SALDI ISRA [28:14]

Jadi, ada dua surat, Pak. Dua-duanya Bapak mengatakan tidak pernah terpidana.

268. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:19]

Ya.

269. KETUA: SALDI ISRA [28:19]

Oke.

270. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:20]

Itu format dari pengadilan, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [28:22]

Oke.

272. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:23]

Meminta kami membuat.

273. KETUA: SALDI ISRA [28:24]

Ya, satu ini kan yang terketik semua. Satu ada yang diisi.

274. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:28]

Ya, itu pendahuluannya, Yang Mulia. Sebelum terketik itu, maka kita (...)

275. KETUA: SALDI ISRA [28:31]

Nah, kalau Bapak sadar pernah dipidana, mestinya kan Bapak sampaikan ke pengadilan ... eh, Kuasa Hukum, Anda jangan bisik-bisikan!

Kan mestinya Bapak ingatkan, "Saya ini pernah dijatuhi pidana sekian bulan, Bu".

276. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:43]

Sudah diingatkan, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [28:45]

Kalau diingatkan, enggak mungkin, Pak, pengadilan mengeluarkan. Enggak akan seceroboh itu pengadilan.

278. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:49]

Kami enggak tahu, karena hasil penelusuran di SIPP-nya mereka tidak temukan. Makanya itu ... dan itu sudah ada di bukti (...)

279. KETUA: SALDI ISRA [28:54]

Pak, saya tidak mau tanya pengadilan menemukan atau tidak. Tapi Bapak sadar atau tidak, Bapak pernah melakukan pidana?

280. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [29:01]

Sadar, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [28:01]

Oke.

282. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [28:02]

Sadar, siap.

283. KETUA: SALDI ISRA [28:02]

Saya berhenti dulu.
Yang Mulia Pak Arsul, ada yang mau didalami? Silakan!

284. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:07]

Ya, Pak Syarifuddin, saya sedikit.
Kan di SKCK tercantum itu, ya, pernah terpidana. Itu tercantum karena polisi yang mencantumkan atau Bapak menyampaikan kepada polisi?

285. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [29:19]

Kami memang menyampaikan, karena mendahului terbitnya SKCK itu ada form yang diisi dan ada pertanyaan, "#Apakah Saudara pernah terpidana?"
"Pernah".

286. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:27]

Begitu?

287. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [29:28]

Siap, Yang Mulia.

288. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:28]

Jadi, Bapak kemudian juga sudah me-declare di situ, mengisi di form itu (...)

289. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [29:31]

Sudah, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:32]

Bahwa Bapak pernah dipidana?

291. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [29:35]

Pidana, siap.

292. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:36]

Itu, ya?

293. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [29:37]

Siap, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:38]

Ya, ya, ya. Ya, itu ... itu saja.

295. KETUA: SALDI ISRA [29:42]

Yang Mulia Pak Ridwan.

296. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:43]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya ke Bawaslu sebentar, ya, sedikit-sedikit saja. Bawaslu, ini tentang Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana ini, ya. Nah, pada waktu itu kan sudah tahu. Ada enggak, di ... dari Bawaslu berhubungan dengan pengadilan untuk memastikan ini? Apa kata pengadilan? Ini kan di dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Sebenarnya kalau keterangan ini memang ada daftarnya.

297. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [30:17]

Izin, Yang Mulia.

298. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:18]

Ya.

299. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [30:19]

Pada tanggal 8 April 2025, setelah menindaklanjuti laporan dari Saudara Reski Adi Putra terkait pelanggaran administrasi, kami lanjut melakukan penelusuran ke pengadilan. Di pengadilan kami menelusuri untuk menemukan mens rea tindak pidananya. Nah, di pengadilan pun kami mendapatkan informasi bahwa berdasarkan keterangan dari pengadilan, itu petugas menginput nama Pak Akhmad Syarifuddin ini dengan tidak mencantumkan gelar doktor, sehingga di sistem tidak ditemukan. Tapi cukup itu keterangan dari pengadilan, Yang Mulia. Sehingga pengadilan menyampaikan hal seperti itu kepada saya pada saat saya melakukan penelusuran ke pengadilan, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:11]

Baik. Nah, ini surat keterangan ini kan biasanya gini. Kalau yang sulit, kadang-kadang dia dipanggil itu pihak itu. Tidak hanya sekadar dikeluarkan surat keterangan dibuat sendiri oleh pengadilan, walaupun tidak disidangkan. Itu waktu itu ada pertanyaan tentunya kan, kenapa kok, tidak ada nama ... tidak dalam daftar ... apa ... Eraterang di dalamnya itu? Atas nama (...)

301. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [31:35]

Siap, Yang Mulia. Kami cuma mempertanyakan hal yang tadi, Yang Mulia, kepada pengadilan.

302. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:39]

Oh, ndak tanya?

303. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [30:40]

Tidak, Yang Mulia.

304. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:41]

Oke. Saya tanya Pak Syarifuddin, ya.

305. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [31:44]

Siap, Yang Mulia.

306. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:45]

Waktu Saudara kan ketika ingin mengajukan ini ke pengadilan, ingin artinya itu meminta, itu dari mana Saudara tahu bahwa memang tidak ada itu? Apa dilihat, ditunjukkan oleh Kepaniteraan? Oleh Panmud hukum?

307. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [32:03]

Karena dari LO kami menyampaikan dari hasil penelusurannya, memang tidak ditemukan, Yang Mulia, itu ... seperti itu.

308. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:10]

Tidak ada di dalam Eraterang? Dalam ... dulu SIPP, ya, sekarang sudah tersendiri itu.

309. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [32:15]

Ya, siap. Siap, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:16]

Tapi tetap tahun-tahun sebelumnya mesti ada itu daftar itu.

311. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [32:19]

Ya, siap, Yang Mulia.

312. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:22]

Cukup, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [32:23]

Yang Mulia Pak Arsul, disilakan!

314. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:25]

Ya, ini ke Bawaslu dululah, ya. Kan Pak Syarifuddin ini kan ... kan punya jabatanlah, nanti ... Bapak kan ASN karier, ya?

315. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [32:38]

Sudah tidak, Yang Mulia.

316. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:40]

Dulunya, dulunya waktu 2018?

317. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [32:43]

Waktu 2018 tidak, Yang Mulia. Saya dulu ASN-nya dosen sebelum 2013 menjabat (...)

318. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:49]

Ya. Ini ... apa ... ke Bawaslu, meskipun tentu komisionernya berbeda, ya, gitu. Kan pasti biasanya kasus seperti itu, itu kan ramai, ya. Masa enggak ada orang Bawaslu yang ingat? Atau orang KPU juga barangkali ini walaupun ... ini harusnya yang menjawab kan, orang KPU Palopo. Masa sih, enggak ada yang seingat itu?

"Lho, itu, Pak itu kan, dulu kan?"

Nah, itu. Jadi, kenapa waktu pertama itu, kok tidak ada orang ribut, termasuk enggak ada teman-teman di Bawaslu maupun di KPU yang aware, gitu?

"Ini orang kan pernah terkena pidana," gitu, lho. Terlepas dari pemahamannya Pak Syarifuddin. Masa sih, enggak ada satu pun yang ... yang ingat? Atau orangnya karena baru semua, termasuk pegawai-pegawainya, gitu, ya? Apa kira-kira penjelasannya itu?

319. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [33:41]

Kalau dari kami, Yang Mulia, tidak ada sama sekali informasi. Bahkan, kami juga dalam prosesnya ndak pernah ada informasi dari masyarakat, apa pun itu sekaitan dengan pidana dari Bapak Akhmad Syarifuddin, ya. Dan jelas bahwa di dalam syaratnya itu ada surat tidak pernah terpidana dari pengadilan.

320. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:04]

Oh, ya, itu satu hal. Tapi biasanya kan, begitu. Karena kan saya ingat, karena saya kan pernah ada di satu proses pencalonan, kan. Begitu ada calon yang, "Oh, ini dulu ... dulu pernah dipidana ini," gitu, kan, gara-gara money politics, gitu, kan. Sudahlah, itu banyak yang kemudian punya ingatan. Ini kira-kira di KPU juga? Apalagi KPU kan sudah ... kan bukan ad hoc, sudah memang ada, gitu. Masa enggak ada sekretariatnyalah? Kalau komisionernya, kan bisa ... bisa berubah, gitu, tapi kan sekretariatnya pegawai KPU-nya kan terus itu. Masa enggak ada satu pun yang mengingatkan, gitu?

321. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [34:43]

Ya, khusus kami, Yang Mulia, nanti kami menjalani tugas selaku KPU Kota Palopo pasca-Putusan Mahkamah 168 (...)

322. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:51]

Eenggak, Pak. Kalau Bapak eenggaklah, Bapak kan orang KPU ini. Maksud saya, di ... eenggak ada suasana, gitu, di KPU Palopo, ya ... ya, termasuk ... terutama pegawainya yang kemudian sama sekali yang ... apa ... lupa atau tidak mengingat, gitu, ya bahwa beliau ini pernah ada kasus pidana pemilu di periode sebelumnya. Eenggak ada itu?

323. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [35:18]

Saya tidak dapat informasi itu, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:20]

Eenggak dapat informasi. Oke, baik. Eenggak apa-apalah karena Bapak orang KPU Sulawesi Selatan, ya?

325. TERMOHON: AHMAD ADIWIJAYA [35:25]

Siap, Yang Mulia.

326. KETUA: SALDI ISRA [35:27]

Cukup.

Pak Akhmad Syarifuddin, ini kan ... sekali lagi saya mau balik tadi kan, titiknya tadi, titik antara Bapak dulu tidak menyadari itu pidana, kemudian ribut menyadari pidana, lalu me-upload di web ... apa ... di medsos sendiri. Bahkan, membikin pengumuman segala macam.

Nah, saya mau tanya kepada Bapak lagi. Ketika Bapak menulis dua surat ini, itu di ... di dalam perasaan Bapak, Bapak itu tidak melakukan tindak pidana? Eenggak. Ini ... ini terus terang, coba ... coba yang sejujurnya. Bapak merasa bahwa yang dihukum ... berapa bulan Bapak dihukum?

327. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [36:10]

4 bulan percobaan.

328. KETUA: SALDI ISRA [36:13]

4 bulan itu percobaan, Bapak merasa itu bukan tindak pidana?

329. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [36:15]

Ya, siap, Yang Mulia. Karena (...)

330. KETUA: SALDI ISRA [36:17]

Sehingga dengar ... dengar dulu! Sehingga karena itu Bapak datang minta surat ke pengadilan tidak melakukan tindak pidana?

331. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [36:27]

Ya, karena sesuai yang dipersyaratkan, Yang Mulia. Karena kami merasa bahwa itu tafsir tidak masuk dalam kriteria yang 5 tahun ke atas itu. Sehingga syarat itu kami isi sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kami, Yang Mulia.

332. KETUA: SALDI ISRA [36:37]

Bapak memaknai itu sebagai tindak pidana, sehingga Bapak mengajukan permohonan tidak pernah terpidana. Keluarlah surat tidak pernah terpidana dari pengadilan negeri. Begitu?

333. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [36:48]

Itu yang dituliskan persyaratan itu, Yang Mulia. Kami memaknai itu sebagai pernah dipidana, makanya kami menyampaikan. Tetapi syarat terbitnya itu bahwa kami harus mengisi, maka kami harus mengisi itu, Yang Mulia.

334. KETUA: SALDI ISRA [36:59]

Pak, kalau Bapak sadar sebagai terpidana, Bapak enggak datang ke pengadilan, Pak. Bapak cukup mengisi yang 4 syarat itu. Nah, itu yang harus Bapak penuhi. Tapi kan ini baru Bapak penuhi ketika mau PSU kan?

335. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [37:11]

Mohon izin, Yang Mulia, itu sebelum PSU, Yang Mulia.

336. KETUA: SALDI ISRA [37:13]

Ya, kan di periode yang tadi yang Bapak menyadari itu tidak tindak pidana itu kan di periode sebelum PSU itu. Ya, kan? Kemudian baru timbul kesadaran Bapak, datanglah, sehingga keluar surat pembatalan dari pengadilan negeri, kan?

337. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [37:29]

Siap, Yang Mulia. Karena yang syarat 4 itu tadi nanti muncul setelah adanya PSU, sebelumnya tidak ada, Yang Mulia.

338. KETUA: SALDI ISRA [37:34]

Ya, betul, sebelumnya karena Bapak menganggap itu tidak tindak pidana?

339. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [37:37]

Siap, Yang Mulia.

340. KETUA: SALDI ISRA [37:40]

Oke? Jadi, ini pihak-pihak lain enggak ada pertanyaan, ini untuk kepentingan klarifikasi Hakim. Jadi, supaya klir ini. Jadi, kami akan menilai ini, fakta ini semua, dan apa pun yang kami putuskan nanti itu berdasarkan fakta itu. Nah, sayangnya Bapak ini harusnya ... saya tanya ke Bawaslu, ketika dirumuskan orang itu memenuhi persyaratan atau tidak, ini semua dibaca, enggak? Bawaslu baca ini, enggak?

341. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [38:12]

Ya, Yang Mulia.

342. KETUA: SALDI ISRA [38:16]

Anda baca ini?

343. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [38:17]

Kalau untuk SKCK itu kan syarat tidak pernah.

344. KETUA: SALDI ISRA [38:21]

Ya, Anda baca ini, enggak? Baca enggak, ada ketentuan pidana di situ?

345. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [38:24]

Kalau itu tidak ... tidak sempat terbaca, Yang Mulia, karena sekali lagi, itu ... apa namanya ... kita hanya melihat apakah dari instansi terkait, kemudian apakah betul-betul SKCK itu memang punya yang bersangkutan.

346. KETUA: SALDI ISRA [38:42]

Anda kan ... ini SKCK, tidak baca pasal-pasal yang disebut di dalamnya? Ada catatannya, lho.

347. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [38:50]

Jadi ... jadi, model pengawasan kami itu, Yang Mulia, itu by Silon, itu dilihat di laptop kemudian di scroll.

348. KETUA: SALDI ISRA [38:58]

Ini ada di Silon?

349. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [38:59]

Ada di Silon.

350. KETUA: SALDI ISRA [38:59]

Tapi Anda tidak baca isinya? Sekadar lihat kayak begitu saja?

351. BAWASLU: WIDIANTO HENDRA [39:03]

Memastikan bahwa memang yang SKCK itu milik yang bersangkutan.

352. KETUA: SALDI ISRA [39:06]

Anda tahu enggak, kami di Mahkamah Konstitusi ini ribuan perkara, itu dibaca dengan detail, lho. Masa kerjaan Anda yang ditugaskan permanen seperti itu hanya sekadar scroll kayak begitu saja?

Padahal ini menyangkut persyaratan, lho. Kalau Anda paham disebut pasalnya, Anda kan tahu ini pasal pidana atau tidak.

Begitu juga KPU. Masa orang disebut di SKCK-nya ada pasal pidananya, lalu dia minta surat mengurus tidak pernah terpidana, dikeluarkan oleh pengadilan, bisa diterima, begitu? Ini problem, lho. Yang kami pengadilan itu, Mahkamah itu enggak bisa membedakan hal-hal yang sama.

Nah, oleh karena ini, pelajaran bagi ... apa ... terlepas dari apa yang dijelaskan oleh Pak Akhmad Syarifuddin tadi, kalau sudah jelas dalam SKCK itu disebutkan pasal, lalu di situ ada pasal yang wilayah pidananya, masa Anda tidak teliti? Lalu mengaminkan saja, ada surat ... apa ... surat tidak pernah terpidana.

Pak Arsul, ada yang mau ditambahkan? Cukup?

Pak Ridwan? Cukup, ya?

Terima kasih semuanya. Pak Akhmad Syarifuddin, terima kasih atas keikhlasan waktu Bapak untuk datang ke sini.

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [40:44]

Izin, Kuasa Pihak Terkait, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [40:46]

Ya, silakan!

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [40:48]

Kami ingin memberikan informasi terkait saksi yang diajukan kemarin Pemohon, Yang Mulia. Kami dapat informasi dari Prinsipal, kalau saksi yang kemarin itu adalah salah satu Saksi Paslon 03 dan Partisan 03, Yang Mulia.

356. KETUA: SALDI ISRA [41:03]

Yang datang ke sini?

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [40:05]

Ya.

358. KETUA: SALDI ISRA [41:05]

Oke, nanti kita catat.

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [40:07]

Terus, Yang Mulia. Masalah Bawaslu, dari informasi Prinsipal, yang menjabat Bawaslu sekarang itu pernah bertugas di Bawaslu pada saat proses tindak pidana Akhmad Syarifuddin di 2018. Jadi, menurut Prinsipal kami, mereka tahu tindak pidana yang diproses (...)

360. KETUA: SALDI ISRA [41:24]

Oke, kita catat.

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [41:24]

Cukup, Yang Mulia.

362. KETUA: SALDI ISRA [41:25]

Tapi bahwa peristiwa-peristiwa yang kita ceritakan tadi benar ya, terlepas dari siapa itu nanti soal lain.

Pemohon, cukup?

363. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [41:37]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

364. KETUA: SALDI ISRA [41:39]

Termohon, cukup?

Ada yang mau disampaikan, Kuasa Termohon?

365. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [41:44]

Cukup, Yang Mulia.

366. KETUA: SALDI ISRA [41:45]

Oke, Pihak Terkait? Cukup?

Bawaslu, Pak Totok? Ini jadi pelajaran ya, Pak Totok, ya.

367. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [41:45]

Izin, Yang Mulia.

368. KETUA: SALDI ISRA [41:53]

Ya, silakan!

369. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [41:45]

Menyambut tadi ada yang diklarifikasi oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait, kami yang menjabat di Bawaslu Kota Palopo, Ketua, Khaerana, Anggota, Widiyanto, dan saya sendiri, Ardiansah, tidak ada yang pernah bertugas pada tahun 2018 pada saat proses pilkada.

Kemudian selanjutnya, izin, Yang Mulia. Ada keterangan di persidangan sebelumnya yang kurang jelas yang saya sampaikan, yang saya mau klarifikasi terkait dengan syarat bagi ... yang harus dipenuhi bagi mantan terpidana yang ada di PKPU 8 Pasal 22, ada empat dokumen tersebut.

370. KETUA: SALDI ISRA [42:36]

Ya.

371. BAWASLU: ARDIANSAH INDRA PANCA PUTRA [42:45]

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Sebagaimana yang terungkap di persidangan kemarin terkait dengan Bawaslu dituding bahwa rekomendasinya kabur, sesuai dengan kewenangan kami di Perbawaslu 9, Perubahan Perbawaslu 8 terkait dengan pelanggaran bahwa kami hanya punya kewenangan untuk menyampaikan terjadi pelanggaran administrasi.

Kemudian, di Pasal 15 PKPU, itu ada kewenangan KPU untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut rekomendasi. Jadi, kami tidak pernah menginstruksikan bahkan di diksi rekomendasi kami untuk melakukan pemenuhan syarat.

Saya kira seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

372. KETUA: SALDI ISRA [43:13]

Oke. KPU? Oke, dikasih kesempatan yang sama semua pihak ini.

Oke, terima kasih. Ini sidang dianggap selesai dan tolong kita semua bisa menahan diri untuk apa pun, jangan sampai ada pula yang mengatakan, "Ini kami kenal dengan Hakim Saldi Isra, Hakim Arsul Sani, Hakim Ridwan Mansyur."

Jangan! Jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu! Begitu kita percayakan kepada Mahkamah, berikan kepercayaan, biar mereka yang memutus dan di samping bertanggung jawab kepada semua yang hadir ini kan, kami bertanggung jawab juga kepada yang Maha Pencipta. Dan

sembilan orang Hakim Konstitusi yang lain akan kita sampaikan fakta ini. Nanti biar bersembilan, termasuk kami yang akan memutuskan terkait dengan fakta ini. Terima kasih semua. Pak Totok, terima kasih atas waktunya. Pak Totok ini rajin. Kalau ada penghargaan, kita kasih penghargaan Pak Totok, rajin sekali mengikuti agenda di sini.

Dengan demikian, sidang klarifikasi untuk perkara ... apa ... pengumuman ... kalau ada yang mau menambah bukti masih bisa sekarang, lho. Ada enggak yang mau menambah? Pak Syarifuddin, ada yang mau menambahkan buktinya?

373. PIHAK TERKAIT: AKHMAD SYARIFUDDIN [44:43]

Siap, Yang Mulia. Tadi sudah disampaikan oleh Kuasa Hukum.

374. KETUA: SALDI ISRA [44:45]

Sudah disampaikan? Sebab di sini enggak ada tambahan bukti ini soalnya.

375. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [44:50]

Dari Pemohon, Yang Mulia, ada tambahan satu bukti.

376. KETUA: SALDI ISRA [44:52]

Apa bukti lagi?

377. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [44:53]

Dua bukti ini pernyataan pihak Pengadilan Negeri Palopo terkait dengan dua dokumen yang diklarifikasi tadi.

378. KETUA: SALDI ISRA [44:59]

Sudah cukup yang tadi.

379. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [45:00]

Baik.

380. KETUA: SALDI ISRA [45:01]

Tapi kalau Anda mau serahkan juga silakan. Tolong diambil!

381. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI KASRUL [45:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [45:07]

Itu petugas, ambil! Diserahkan, tolong di ... apa ... dicek.

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [45:32]

Izin, Yang Mulia. Sebelum pengesahan bukti, ini mungkin jadi pembelajaran kami ke depannya tentang hukum acara pembuktian perselisihan hasil. Jadi, kan kemarin, Yang Mulia, kami sempat mendalilkan tentang surat edaran. Dalam pandangan kami, surat edaran ini berupa regeling. Jadi, bukan suatu keputusan atau beschikking yang mesti dijadikan alat bukti. Jadi, pemahaman kami itu ada sifatnya *notoire feiten*. Jadi, enggak perlu dijadikan bukti. Jadi, kami enggak sempat ajukan alat bukti tentang SEMA pengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana itu, Yang Mulia.

384. KETUA: SALDI ISRA [46:06]

Oke, biar dicatat, ya.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JULIANTO ASIS [46:08]

Ya, Yang Mulia.

386. KETUA: SALDI ISRA [46:09]

Oke, terima kasih.

Tadi ada tambahan bukti P-berapa? P-41 sampai 42?

KETUK PALU 1X

Ini penundaan sidang Perkara Nomor 326/PHPU.Walikota-XXIII/2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Palopo Tahun 2024 ditunda, dan setelah ini kami, Panel, akan menyampaikan fakta-fakta ini kepada enam Hakim Konstitusi yang lain, akan bersembilan dengan kami, dan nanti akan diputuskan berkenaan dengan hal ini. Dan apa pun putusannya, itu akan jadi putusan Mahkamah. Itu yang pertama.

Yang kedua, tidak ada lagi alat bukti atau inzage karena perkara ini sudah selesai disidangkan dan pembuktiannya sudah juga selesai. Dan selanjutnya, Mahkamah akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan. Untuk itu, para pihak menunggu panggilan secara resmi dari Mahkamah melalui Kepaniteraan. Sementara kalau tidak ada perubahan, kita jadwalkan pengucapan putusan tanggal 8 Juli. Itu hari Selasa, kalau tidak ada perubahan. Ini kalau ada perubahan nanti jadwal kita harus diubah juga karena batas akhirnya tanggal 8 itu.

Dan kami berterima kasih kepada kita semua, dengan segala kerendahan hati, supaya kita bisa menunggu dengan sabar, biar kami berpikir dengan tenang untuk memutuskan soal-soal ini.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-2023 ... maaf, XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 4 Juli 2025
Plt Panitera,
Wiryanto

